

Strategi Pengembangan Wisata Air Terjun Berbasis Ekowisata Dan Pemberdayaan Masyarakat: Analisis Empiris Di Desa Santong, Kabupaten Lombok Utara

Fariz Ridho Pratama¹, Zulhadi², Satria Efendi³

¹Akademi Administrasi RS Mataram, ^{2,3}Universitas 45 Mataram

Nusa Tenggara Barat - Indonesia

farizridhop@gmail.com, zulhadi198867@gmail.com, efendi.satria7@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received Maret, 2026

Revised April, 2026

Accepted Juli, 2026

Available online Juli 2026

Kata Kunci: *Wisata; Air Terjun; Ekowisata; Pemberdayaan Masyarakat; Santong*



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2026 by Author. Published by
[ejournalHamjahdiha](https://ejournal.hamjahdiha.org).

ABSTRAK

Desa Santong di Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, memiliki potensi kekayaan alam berupa bentang air terjun yang melimpah, namun pengelolaannya sebagai destinasi ekowisata berkelanjutan belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi dan kondisi objektif destinasi wisata air terjun di Desa Santong, mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi dinamika pengembangannya, serta merumuskan strategi pengembangan ekowisata yang selaras dengan prinsip pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal. Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara *purposive* (terdiri atas pihak pemerintah desa, pengelola tempat wisata, tokoh masyarakat, dan wisatawan), serta studi dokumentasi atas

rekapitulasi data kunjungan. Data dianalisis mengacu pada model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta diuji keabsahannya menggunakan teknik triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan *member check*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Santong memiliki lebih dari 30 titik air terjun dengan dua destinasi utama, yaitu Tiu Teja (ketinggian ± 40 meter) dan Tiu Sekeper (ketinggian ± 102 meter). Meskipun memiliki keaslian alam yang tinggi, pengembangannya masih menghadapi hambatan pada kendala aksesibilitas (jalan tanah/berbatu sepanjang 2 km), keterbatasan amenities (belum ada toilet permanen dan penunjuk arah), serta kelembagaan Pokdarwis yang belum memiliki struktur kerja fungsional dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Strategi pengembangan yang direkomendasikan berfokus pada penataan infrastruktur dasar, penguatan kapasitas kelembagaan Pokdarwis melalui pelatihan dan legalitas BUMDes, optimalisasi promosi digital, serta penerapan regulasi konservasi lingkungan yang ketat untuk menjaga kelestarian ekosistem.

PENDAHULUAN

Sektor kepariwisataan telah menempatkan posisinya sebagai salah satu pilar utama pembentuk struktur perekonomian, baik pada skala nasional maupun regional. Seiring dengan pergeseran dinamika kehidupan sosial, preferensi dan pola konsumsi wisatawan global mengalami pemikiran ulang yang mendasar. Wisatawan tidak lagi berfokus pada aktivitas wisata massal (*mass tourism*) yang bersifat konsumtif dan padat modal, melainkan bergeser ke arah bentuk penjelajahan yang lebih dekat

dengan alam, menghargai kebudayaan lokal, serta mengedepankan keberlanjutan ekologi, yang secara konseptual dikenal sebagai ekowisata (*ecotourism*). Ekowisata tidak sekadar menjual estetika pemandangan alam, melainkan mengintegrasikan tiga pilar fundamental: upaya konservasi lingkungan hayati, keterlibatan aktif masyarakat lokal (*community involvement*), serta penyediaan manfaat ekonomi yang terdistribusi secara adil dan berkelanjutan bagi kawasan sekitarnya. Perubahan paradigmatis ini kian menguat pada era pascapandemi, di mana ruang terbuka hijau, kesegaran udara pegunungan, serta interaksi autentik dengan lingkungan alam menjadi prioritas utama bagi para pelancong domestik maupun mancanegara.

Ekowisata (*ecotourism*) secara konseptual didefinisikan sebagai bentuk perjalanan wisata yang bertanggung jawab ke area-area alami, yang bertujuan untuk mengkonservasi lingkungan, melestarikan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat lokal, serta melibatkan unsur edukasi dan interpretasi bagi para penguncungnya (Butler, 1980; Fandeli, 2002). Berbeda dari pariwisata konvensional yang sering kali menitikberatkan pada eksploitasi komersial kawasan dan pembangunan fisik skala besar, ekowisata menempatkan batas-batas daya dukung lingkungan (*carrying capacity*) sebagai batasan utama dalam setiap perencanaan aktivitas pariwisata. Prinsip-prinsip ekowisata mencakup minimalisasi dampak negatif terhadap alam dan budaya, penumbuhan kesadaran lingkungan bagi wisatawan dan pengelola, penyediaan manfaat keuangan langsung bagi upaya pelestarian alam, pemeliharaan keanekaragaman hayati, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan destinasi secara berkeadilan.

Pengembangan destinasi wisata berbasis masyarakat (*Community-Based Tourism / CBT*) merupakan pendekatan perancangan pariwisata yang menempatkan masyarakat lokal sebagai pemilik, pengelola, dan penerima manfaat utama dari aktivitas kepariwisataan yang berlangsung di wilayah mereka (Cooper et al., 2008). Dalam kerangka CBT, masyarakat tidak sekadar dijadikan sebagai objek atau penonton pasif dari pembangunan pariwisata yang didorong oleh investor luar, melainkan diposisikan sebagai subjek utama yang memegang kendali atas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga pembagian hasil usaha pariwisata. Pendekatan ini relevan diterapkan pada kawasan pedesaan yang memiliki potensi sumber daya alam melimpah namun masih menghadapi keterbatasan modal finansial dan kapasitas sumber daya manusia. Elemen penting dalam keberhasilan penerapan CBT meliputi pembentukan kelembagaan lokal yang solid, seperti Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) atau unit usaha pariwisata di bawah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kelembagaan ini berfungsi sebagai wadah koordinasi, penyusun aturan main bersama, penampung aspirasi warga, serta pengelola retribusi pariwisata. Pembentukan kelembagaan swadaya masyarakat ini mensyaratkan adanya prinsip partisipasi inklusif, transparansi keuangan, dan kepemimpinan lokal yang berintegritas. Melalui CBT, pembangunan kepariwisataan diproyeksikan tidak hanya menghasilkan keuntungan finansial jangka pendek, tetapi juga memperkuat modal

sosial (*social capital*), meningkatkan rasa bangga terhadap kebudayaan dan ruang hidup lokal, serta menjamin bahwa kepemilikan aset-aset strategis kawasan tetap berada di tangan warga setempat.

Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya Kabupaten Lombok Utara, merupakan wilayah yang dikaruniai kekayaan geografis dan bentang alam pegunungan yang sangat potensial bagi pengembangan destinasi ekowisata berbasis perairan darat. Di antara wilayah-wilayah penyangga bentang alam tersebut, Desa Santong yang terletak di Kecamatan Kayangan memegang peranan strategis dengan keunikan geografisnya. Berada pada ketinggian sekitar 650 meter di atas permukaan laut (mdpl), Desa Santong memiliki karakteristik iklim yang sejuk, vegetasi hutan tropis yang terawat, serta hamparan topografi berbukit. Keadaan tipologi wilayah yang demikian menjadikan Desa Santong kaya akan potensi hidrologi berupa aliran sungai dan air terjun. Bahkan, potensi sumber daya air tersebut secara informal melahirkan julukan lokal bagi Desa Santong sebagai "*Kingdom of Waterfall*" atau Kerajaan Air Terjun, yang ditandai dengan keberadaan lebih dari 30 titik air terjun yang tersebar di sepanjang kawasan hutan dan area perkebunan warga.

Kendati dikaruniai potensi sumber daya alam yang melimpah dan autentik, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pemanfaatan objek wisata air terjun di Desa Santong belum mencapai tahap pengelolaan yang terstruktur dan optimal. Keberadaan puluhan air terjun tersebut masih berada pada kategori sumber daya alam pasif yang belum tergarap secara sistematis. Berbagai kendala mendasar masih membayangi kawasan ini, mulai dari kondisi infrastruktur aksesibilitas yang terbatas di mana jalur darat menuju lokasi mayoritas masih berupa tanah dan bebatuan, minimnya sarana penunjang atau amenitas dasar seperti ketersediaan fasilitas toilet umum, area parkir resmi, hingga gubuk istirahat yang memadai. Selain itu, aspek tata kelola kelembagaan masih berada dalam taraf yang sangat sederhana. Keberadaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di kawasan tersebut belum tertata secara profesional, belum memiliki pembagian divisi kerja yang spesifik, serta belum didukung oleh keberadaan badan usaha desa yang menaungi alokasi retribusi dan pendanaan secara transparan.

Kondisi tersebut berdampak langsung pada belum optimalnya angka kunjungan wisatawan serta minimnya dampak ekonomi langsung yang dirasakan oleh warga setempat. Keterlibatan masyarakat lokal dalam rantai nilai pariwisata masih berada pada tingkat inkremental dan bersifat individual, seperti membuka warung kecil berskala mikro atau menjadi pemandu jalan secara tidak tetap. Di sisi lain, aktivitas promosi destinasi masih sangat terbatas pada penyebaran informasi secara verbal (*word of mouth*) serta unggahan pribadi pengunjung di media sosial tanpa adanya strategi komunikasi pemasaran digital yang terencana dari pihak pengelola. Apabila kondisi ini dibiarkan tanpa adanya intervensi formulasi strategi yang komprehensif, maka potensi ekowisata Desa Santong dikhawatirkan hanya menjadi aset lingkungan

yang tidak terpendayagunakan, atau sebaliknya, mengalami degradasi kualitas lingkungan akibat pertumbuhan kunjungan yang tidak teratur dan tidak memiliki payung hukum serta regulasi konservasi yang jelas.

Berdasarkan konteks permasalahan tersebut, penelitian ini dilaksanakan untuk mengkaji secara mendalam realitas empiris potensi ekowisata air terjun Desa Santong, mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi dinamika pengembangannya, serta merumuskan strategi pengoperasian destinasi berbasis ekowisata dan pemberdayaan masyarakat yang tepat sasaran. *Gap analysis* atau celah studi yang menjadi fokus penelitian ini terletak pada keterbatasan kajian empiris terdahulu dalam membedah secara simultan keterkaitan antara aspek ketersediaan infrastruktur fisik (aksesibilitas dan amenitas), kesiapan kelembagaan swadaya lokal (Pokdarwis), serta tingkat kepuasan dan keluhan spesifik dari wisatawan pada destinasi air terjun di kawasan dataran tinggi yang belum terjamah (*virgin destination*). Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini hadir melalui pengintegrasian data kualitatif berbasis narasi informan kunci dengan data rekapitulasi kuantitatif kepuasan pengunjung di lapangan, guna menghasilkan rumusan strategi pengembangan yang tidak hanya presisi secara teoritis, tetapi juga berakar pada integritas fakta empiris di lokasi penelitian. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis potensi, kondisi fisik, dan profil kunjungan destinasi wisata air terjun di Desa Santong; (2) mengidentifikasi hambatan internal dan tantangan eksternal dalam tata kelola tempat wisata; dan (3) merumuskan prioritas strategi pengembangan ekowisata yang berkelanjutan serta berbasis pada pemberdayaan masyarakat setempat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami secara mendalam dan menyeluruh mengenai potensi, permasalahan, serta konteks sosial-ekologis pengembangan wisata air terjun di Desa Santong, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menangkap dinamika interaksi sosial, persepsi masyarakat, serta realitas empiris di lapangan secara naturalistik tanpa adanya manipulasi variabel. Data yang digali dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui kegiatan observasi partisipatif parsial pada objek wisata serta melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) bersama para informan kunci. Penentuan informan dilakukan secara *purposive* (disengaja berdasarkan kriteria dan kapasitas informasi yang dimiliki), yang melibatkan unsur aparat pemerintah desa, pengelola objek wisata dari unsur Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) seperti Mas Riyan, tokoh masyarakat lokal, serta para wisatawan yang berkunjung ke lokasi.

Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari dokumen resmi pemerintah desa, literatur ilmiah bereputasi yang relevan, serta rekapitulasi data historis hasil pencatatan survei kunjungan wisatawan di destinasi Air Terjun Tiu Teja. Teknik pengumpulan data dilaksanakan secara sistematis melalui tiga jalur utama: observasi langsung terhadap kondisi fisik jalan, vegetasi, dan sarana penunjang di area air terjun; wawancara terstruktur dan semi-terstruktur menggunakan panduan wawancara; serta studi dokumentasi atas arsip catat instansi dan lembar survei lapangan. Seluruh data kualitatif yang terkumpul selanjutnya dianalisis mengacu pada model analisis interaktif Miles dan Huberman (1994), yang terdiri dari tiga tahapan yang berlangsung secara serentak dan berkesinambungan, yaitu: (1) reduksi data (*data reduction*), yakni proses pemilahan, pemfokusan, pengabstrakan, dan pengorganisasian data mentah dari catatan lapangan; (2) penyajian data (*data display*), yakni penyusunan sekumpulan informasi terorganisir ke dalam bentuk teks naratif, tabel matriks, atau skema untuk memudahkan pemahaman; serta (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*), yakni perumusan makna dari temuan penelitian yang diuji keabsahannya sepanjang proses studi.

Untuk menjamin derajat kepercayaan (*trustworthiness*) dan validitas data empiris yang disajikan, penelitian ini menerapkan teknik pengujian keabsahan data melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik (Moleong, 2017; Sugiyono, 2019). Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan dan mengecek ulang informasi yang diberikan oleh informan pengelola (Pokdarwis) dengan pernyataan dari pihak pemerintah desa, masyarakat sekitar, dan wisatawan. Triangulasi teknik dilakukan dengan mengecek konformitas antara hasil wawancara mendalam dengan temuan observasi fisik langsung di lokasi serta catatan data dokumentasi yang tersedia. Selain itu, prosedur *member check* juga dilakukan kepada informan kunci untuk memastikan bahwa interpretasi dan transkripsi narasi yang disusun peneliti telah sesuai dengan fakta yang disampaikan oleh informan di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Potensi Ekologis, Profil Pengunjung, dan Realitas Empiris Destinasi Wisata Air Terjun Desa Santong*

Desa Santong secara geografis membentang di wilayah Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada kawasan dataran tinggi dengan ketinggian rata-rata mencapai 650 meter di atas permukaan laut (mdpl). Topografi wilayah yang berbukit-bukit serta berbatasan langsung dengan area hutan lindung memberikan keunggulan ekologis tersendiri bagi desa ini. Desa Santong memiliki julukan sebagai "*Kingdom of Waterfall*" atau Kerajaan Air Terjun, sebuah predikat lokal yang didasarkan pada keberadaan lebih dari 30 titik terjunan air alami yang tersebar di sepanjang

lintasan sungai dan vegetasi hutan tropis di kawasan tersebut. Keberadaan puluhan air terjun ini didukung oleh kondisi kualitas air yang sangat jernih, bentang alam yang belum banyak mengalami deformasi fisik akibat pembangunan, serta kondisi udara pegunungan yang sejuk dan asri.

Di antara puluhan air terjun yang teridentifikasi di Desa Santong, terdapat dua objek utama yang memiliki tingkat popularitas dan frekuensi kunjungan paling menonjol, yaitu Air Terjun Tiu Teja dan Air Terjun Tiu Sekeper. Air Terjun Tiu Teja memiliki karakteristik khas berupa terjunan air kembar dengan ketinggian mencapai sekitar 40 meter. Untuk mencapai lokasi Tiu Teja, wisatawan membutuhkan waktu tempuh berjalan kaki sekitar 30 menit dari titik pemberhentian akses kendaraan. Sementara itu, Air Terjun Tiu Sekeper memiliki keistimewaan ekologis yang sangat tinggi karena memiliki ketinggian terjunan air mencapai 102 meter, yang menempatkannya sebagai air terjun tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Namun demikian, lokasi Tiu Sekeper berada jauh di dalam kawasan hutan, sehingga memerlukan waktu tempuh perjalanan kaki sekitar 2 jam dari titik awal pendakian.

Secara spasial-lokasional, kawasan air terjun di Desa Santong berjarak sekitar 60 hingga 80 kilometer dari pusat Kota Mataram. Jarak tersebut dapat ditempuh menggunakan kendaraan bermotor pribadi dengan estimasi waktu perjalanan darat antara 1,5 hingga 3 jam, tergantung pada kondisi lalu lintas dan titik lokasi air terjun spesifik yang hendak dituju. Setibanya di perbatasan wilayah Desa Santong, perjalanan menuju titik dasar air terjun tidak dapat diakses penuh menggunakan kendaraan roda empat maupun roda dua. Wisatawan harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menelusuri jalur jalan setapak dan lintasan hutan adat. Durasi lintasan berjalan kaki ini bervariasi secara signifikan, berkisar antara 20 menit hingga 4 jam, sangat bergantung pada tingkat kedalaman posisi air terjun yang dituju di dalam kawasan hutan.

Berdasarkan pencatatan data historis kunjungan empiris yang terekam pada objek wisata Air Terjun Tiu Teja pada tanggal 2 Agustus 2018, tercatat jumlah total pengunjung yang melakukan registrasi di lokasi sebanyak 103 orang. Komposisi demografis dari total 103 pengunjung tersebut didominasi oleh wisatawan berjenis kelamin laki-laki, yakni sebanyak 68% (atau setara dengan 70 orang), sedangkan wisatawan berjenis kelamin perempuan mencakup 32% (atau setara dengan 33 orang). Dari sisi tingkat kepuasan pengunjung terhadap layanan dan kondisi destinasi secara keseluruhan, mayoritas wisatawan menyatakan respons positif, di mana 83% pengunjung (atau setara 85 orang) mengaku puas dengan pengalaman berwisata di lokasi tersebut. Akan tetapi, terdapat 17% pengunjung (atau setara 18 orang) yang secara tegas menyatakan ketidakpuasan atas kondisi objek wisata.

Penelusuran data kualitatif mengenai alasan spesifik di balik ketidakpuasan 17% pengunjung tersebut mengindikasikan bahwa permasalahan infrastruktur fisik dan fasilitas penunjang menjadi penyebab utama kekecewaan wisatawan. Dari kelompok pengunjung yang tidak puas tersebut, sebanyak 43% mengeluhkan hambatan aksesibilitas fisik dan kesukaran medan perjalanan untuk mencapai lokasi air terjun. Selanjutnya, 27% pengunjung mengeluhkan minimnya ketersediaan sarana penunjang atau amenities yang memadai di lokasi. Sebesar 15% pengunjung menyoroti kurangnya ketersediaan sarana pendukung secara umum di kawasan wisata, dan sebesar 10% sisanya melayangkan keluhan terkait dengan keterbatasan serta ketidaktertataan fasilitas tempat berjualan para pedagang lokal di sekitar area wisata.

Kategori Keluhan Wisatawan	Persentase Keluhan	Deskripsi Permasalahan Lapangan
Aksesibilitas / Medan Perjalanan	43%	Jalan tanah dan bebatuan sepanjang 2 km, licin dan berlumpur saat musim hujan.
Kurangnya Sarana Penunjang (Amenitas)	27%	Ketiadaan toilet umum permanen, gubuk istirahat seadanya dari kayu.
Kurangnya Sarana Umum Lainnya	15%	Minimnya papan petunjuk arah (signage) dan informasi keselamatan rute.
Keterbatasan Fasilitas Pedagang	10%	Lapak jualan warga masih tidak tertata dan pilihan komoditas terbatas.

Kondisi riil infrastruktur jalan menuju lokasi air terjun memang menjadi keluhan krusial yang konsisten disampaikan oleh pengunjung dan pengelola. Jalur utama sepanjang 2 kilometer yang menghubungkan jalan desa menuju titik permulaan kawasan air terjun masih berupa jalan tanah dan bebatuan lepas. Pada musim hujan, kondisi jalur setapak ini berubah menjadi sangat licin, berlumpur, serta membahayakan bagi pengendara sepeda motor maupun pejalan kaki. Pihak pengelola swadaya bersama masyarakat telah beberapa kali mengajukan usulan perbaikan dan pengerasan jalan kepada pemerintah desa setempat, namun keterbatasan alokasi anggaran daerah menjadi hambatan utama yang menyebabkan perbaikan infrastruktur jalan belum dapat terealisasi hingga saat ini.

Dari aspek sarana dan prasarana (amenitas), fasilitas penunjang yang tersedia di lokasi air terjun masih dalam kondisi yang sangat minim dan berskala darurat. Di area objek wisata, sarana istirahat yang tersedia baru berupa gubuk-gubuk kayu sederhana yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat setempat tanpa konstruksi permanen. Fasilitas hygiene dasar seperti toilet umum untuk pengunjung belum terbangun sama sekali di area lokasi air terjun. Lahan parkir kendaraan wisatawan belum ditata secara khusus, melainkan masih memanfaatkan pekarangan dan lahan milik warga lokal dengan sistem penitipan seadanya. Selain itu, kelengkapan rambu petunjuk arah (*signage*) di sepanjang lintasan berjalan kaki masih sangat minim, yang kerap mengakibatkan wisatawan yang baru pertama kali berkunjung mengalami kebingungan atau tersesat di dalam jalur perkebunan dan hutan.

Dari segi tata kelola kelembagaan, aktivitas pariwisata di Desa Santong dikelola oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang baru dibentuk secara resmi sekitar 3 tahun lalu (beroperasi sejak kisaran tahun 2015/2016 berdasarkan inisiatif pemuda desa). Struktur organisasi Pokdarwis ini secara formal beranggotakan 15 orang, namun dalam operasional harian hanya sekitar 8 hingga 10 orang anggota yang aktif menjalankan kegiatan lapangan. Peran yang dijalankan oleh Pokdarwis sejauh ini masih terbatas pada pengaturan jadwal penjagaan di lokasi, pemungutan biaya retribusi kunjungan berskala seikhlasnya dari pengunjung, serta pembersihan sampah secara berkala di area objek wisata. Pokdarwis ini belum memiliki pembagian divisi kerja fungsional yang jelas, seperti bidang promosi pemasaran, bidang keamanan dan keselamatan wisatawan, maupun divisi pengembangan usaha.

Pengembangan kapasitas sumber daya manusia di tubuh Pokdarwis juga masih menghadapi tantangan serius. Mayoritas anggota Pokdarwis belum pernah memperoleh pelatihan atau pendampingan formal mengenai manajemen tata kelola destinasi ekowisata, teknik pemanduan (*tour guiding*), maupun penanganan keselamatan pengunjung, sehingga pola kerja kelembagaan masih bersifat ujicoba (*trial and error*). Koordinasi antara Pokdarwis dengan Pemerintah Desa Santong juga belum berjalan optimal, khususnya mengenai kejelasan pembagian kewenangan tata kelola dan mekanisme bagi hasil dari pendapatan retribusi. Hingga saat ini, belum ada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) khusus yang menaungi dan melegalkan operasional komersial sektor pariwisata ini, sehingga manajemen pencatatan keuangan pariwisata masih dikelola secara konvensional dan sangat sederhana.

Pada aspek keterlibatan ekonomi masyarakat lokal, dinamika pariwisata di Desa Santong telah mulai memberikan dampak ekonomi positif, meskipun skalanya masih terbatas dan belum terdistribusi secara merata. Sebagian kecil

warga yang tinggal di sekitar akses menuju air terjun mulai membuka usaha warung makan minum berskala mikro, serta menawarkan jasa pemandu jalan (*local guide*) bagi pengunjung yang membutuhkan pengawalan menelusuri rute hutan. Manfaat ekonomi yang dirasakan warga mencakup pendapatan tambahan dari penjualan makanan ringan, minuman, serta retribusi jasa parkir di pekarangan rumah. Kendati demikian, sebagian besar warga desa lainnya masih berada pada posisi penonton pasif dan belum memandang sektor pariwisata sebagai mata pencaharian alternatif yang stabil, lantaran frekuensi kunjungan yang ramai umumnya hanya terjadi pada hari Sabtu, Minggu, atau musim liburan sekolah dengan jumlah puluhan orang per hari, sementara pada hari kerja biasa angka kunjungan relatif sepi.

Pola promosi destinasi wisata air terjun Desa Santong hingga saat ini masih didominasi oleh mekanisme penyebaran informasi secara informal dari mulut ke mulut (*word of mouth*) serta hasil unggahan swadaya dari para pengunjung di media sosial seperti Instagram dan TikTok. Aktivitas promosi digital yang dilakukan oleh institusi pengelola belum berjalan karena Pokdarwis Desa Santong belum memiliki akun media sosial resmi yang dikelola secara konsisten dan terencana. Ketidadaan divisi khusus promosi serta keterbatasan literasi digital anggota pengelola menjadi kendala utama dalam meluaskan jangkauan pemasaran destinasi ini. Akibatnya, profil pengunjung yang mendatangi Desa Santong mayoritas masih terbatas pada wisatawan lokal dari sekitar pulau Lombok, kalangan mahasiswa, serta kelompok komunitas pecinta alam, sedangkan tingkat kunjungan wisatawan mancanegara masih sangat langka.

Dalam hal pelestarian lingkungan, pengelola dan masyarakat lokal memiliki tingkat kesadaran dan kekhawatiran yang cukup tinggi terhadap potensi kerusakan ekologis apabila arus kunjungan wisatawan berkembang masif di masa depan. Warga dan Pokdarwis menyadari risiko pencemaran sampah plastik serta kerusakan vegetasi hutan jika tempat wisata tersebut tidak ditata dengan aturan hukum yang ketat. Meskipun hingga saat ini belum ada peraturan desa (Perdes) tertulis yang mengikat dan memberikan sanksi tegas terkait pelestarian kawasan air terjun, pengelola secara verbal terus memberikan imbauan kepada para pengunjung untuk menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan di sepanjang lintasan hutan dan lokasi terjunan air.

2. Analisis Kritis Aksesibilitas, Amenitas, Kelembagaan Pokdarwis, dan Strategi Ekowisata Berkelanjutan

Temuan empiris di Desa Santong mengindikasikan bahwa destinasi wisata air terjun di wilayah ini sedang berada pada fase evolusi awal penciptaan kawasan wisata. Jika dianalisis menggunakan kerangka teori *Tourist Area Life Cycle* (TALC) yang dikembangkan oleh Butler (1980), posisi pengembangan

wisata di Desa Santong berada pada transisi antara tahap penjelajahan (*exploration*) dan tahap keterlibatan (*involvement*). Pada tahap ini, potensi keaslian alam yang tinggi (*virgin nature*) menjadi daya tarik utama yang memicu kedatangan wisatawan secara spontan. Namun, karena keterlibatan kelembagaan lokal dan intervensi pemerintah masih bersifat parsial dan swadaya, kesenjangan antara potensi sumber daya alam dengan daya dukung infrastruktur fisik menjadi isu mendasar yang dapat menghambat perkembangan destinasi ke tingkat yang lebih matang.

Kesenjangan terbesar yang terungkap dari analisis data empiris terletak pada dimensi aksesibilitas dan amenitas, yang secara mendasar mengonfirmasi kerangka komponen pariwisata 4A (*Attraction, Accessibility, Amenity, Ancillary*) dari Cooper et al. (2008). Dari aspek daya tarik (*attraction*), Desa Santong memiliki keunggulan komparatif yang sangat kuat dengan predikat "*Kingdom of Waterfall*", ditunjang oleh variasi tingkatan air terjun mulai dari Air Terjun Tiu Teja (40 meter) yang berkarakteristik kembar hingga Air Terjun Tiu Sekeper (102 meter) sebagai air terjun tertinggi di Nusa Tenggara Barat. Keunggulan fisik ini terbukti mampu memberikan kepuasan yang tinggi (83%) bagi mayoritas pengunjung yang berhasil mencapai lokasi. Namun, tingginya angka kepuasan tersebut terdegradasi oleh ketidakpuasan 17% pengunjung, di mana 43% di antaranya dipicu secara langsung oleh hambatan medan fisik jalur tanah/bebatuan sepanjang 2 km serta lamanya waktu tempuh berjalan kaki di dalam hutan (20 menit hingga 4 jam).

Komponen 4A	Kondisi Faktual Empiris	Evaluasi Kinerja Destinasi
Attraction (Daya Tarik)	>30 Air Terjun, Tiu Teja (40m, kembar), Tiu Sekeper (102m, tertinggi di NTB), udara sejuk 650 mdpl.	Sangat Tinggi (Unggul)
Accessibility (Aksesibilitas)	Jalan tanah/batu 2 km, licin saat hujan; waktu tempuh trek hutan 20 menit hingga 4 jam.	Rendah (Hambatan Utama)
Amenity (Amenitas)	Gubuk kayu swadaya non-permanen, belum ada toilet umum, parkir di lahan warga seadanya.	Sangat Rendah (Kritis)
Ancillary (Kelembagaan)	Pokdarwis informal 15 org (8-10 aktif), tanpa divisi fungsional, belum ada BUMDes & Perdes.	Sedang (Membutuhkan Legalitas)

Ketimpangan pada aspek amenitas juga memperlihatkan belum terpenuhinya standar ketersediaan sarana pariwisata minimal. Ketiadaan toilet umum yang permanen dan terawat di lokasi air terjun merupakan temuan kritis, mengingat kebutuhan fasilitas higiene adalah hak dasar setiap pengunjung destinasi ekowisata. Ketergantungan sarana istirahat hanya pada gubuk kayu tidak permanen hasil swadaya warga menunjukkan belum hadirnya investasi infrastruktur publik dari pemerintah daerah. Ketiadaan papan petunjuk arah (*signage*) yang memadai tidak hanya menurunkan tingkat kenyamanan berwisata, melainkan juga berpotensi mengancam keselamatan pengunjung saat melintasi jalur kawasan hutan yang belum terjamah. Masalah ini sejalan dengan temuan survei di mana 27% dan 15% dari pengunjung yang tidak puas mengaitkan kekecewaan mereka pada kurangnya sarana penunjang dan sarana umum.

Pada dimensi kelembagaan dan pendukung (*ancillary*), temuan penelitian menunjukkan adanya *institutional lag* atau ketertinggalan kelembagaan. Pembentukan Pokdarwis 3 tahun lalu oleh para pemuda desa merupakan langkah awal penataan partisipatif yang baik dalam kerangka *Community-Based Tourism* (CBT). Namun, operasionalisasi Pokdarwis yang hanya ditopang oleh 8 hingga 10 anggota aktif tanpa struktur divisi kerja fungsional, tanpa pembekalan keahlian tata kelola (*capacity building*), serta bekerja dengan metode *trial and error*, membuat tata kelola destinasi rentan terhadap ketidakpastian. Ketiadaan payung hukum berupa Peraturan Desa (Perdes) serta belum diintegrasikannya pengelolaan wisata ke dalam unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) membatasi kewenangan Pokdarwis dalam menarik retribusi secara resmi, mengelola alokasi dana secara transparan, serta membangun kemitraan profesional dengan pihak luar.

Dinamika pemberdayaan ekonomi masyarakat juga menunjukkan bahwa dampak pariwisata di Desa Santong belum mencapai tahap inklusif. Manfaat ekonomi yang ada masih terakumulasi pada individu warga yang berdomisili paling dekat dengan titik masuk lokasi wisata melalui penjualan makanan ringan dan penarikan biaya parkir di pekarangan rumah. Sebagian besar warga desa belum terserap dalam rantai pasok pariwisata (*tourism supply chain*). Kondisi ini apabila dibiarkan dapat memicu ketimpangan ekonomi lokal dan menurunkan dukungan sosial masyarakat terhadap keberlanjutan pariwisata. Oleh karena itu, pendekatan CBT di Desa Santong memerlukan rekayasa sosial (*social engineering*) yang mendorong keterlibatan warga secara lebih luas, misalnya melalui pengembangan paket wisata trekking terpadu, edukasi pemanduan lokal, dan penyediaan cinderamata berbasis hasil perkebunan lokal.

Dalam perspektif pemasaran, ketergantungan pada media sosial pribadi pengunjung dan promosi *word of mouth* terbukti tidak memadai untuk mendongkrak ceruk pasar yang lebih luas. Di tengah era digitalisasi pariwisata,

ketiadaan saluran komunikasi resmi (seperti akun media sosial terverifikasi atau platform informasi digital) yang dikelola oleh Pokdarwis membuat informasi mengenai potensi besar Air Terjun Tiu Teja dan Tiu Sekeper tidak tersebar secara presisi ke pasar wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara berskala luas. Dominasi pengunjung yang sejauh ini masih terbatas pada wisatawan lokal Lombok dan komunitas pecinta alam menunjukkan bahwa destinasi ini belum mampu menjangkau segmen pasar berdaya beli lebih tinggi (*high-spending tourists*) yang membutuhkan kepastian informasi mengenai keamanan jalur, aksesibilitas, dan fasilitas di lokasi.

Menanggapi seluruh dinamika empiris tersebut, formulasi strategi pengembangan ekowisata di Desa Santong harus disusun secara terintegrasi dengan memprioritaskan empat pilar utama strategi:

- a. Strategi Penataan Infrastruktur dan Aksesibilitas Terpadu: Prioritas utama wajib dialokasikan pada pengerasan dan perbaikan jalur jalan tanah sepanjang 2 kilometer dari jalan utama desa menuju pintu masuk kawasan air terjun. Perbaikan ini tidak boleh merusak kawasan alam, melainkan menggunakan material ramah lingkungan seperti paving block atau pengerasan batu alam yang menyatu dengan lingkungan. Selain itu, perlu dibangun secara mendesak fasilitas amenities dasar meliputi toilet umum berstandar sanitasi baik, tempat sampah pilah secara terdistribusi, pembuatan rambu petunjuk arah yang informatif di sepanjang rute hutan, serta penataan area parkir resmi desa.
- b. Strategi Penguatan Kelembagaan dan Kapasitas Sumber Daya Manusia berbasis CBT: Pemerintah Desa Santong bersama Dinas Pariwisata Daerah perlu secara formal memfasilitasi restrukturisasi Pokdarwis dengan menetapkan pembagian kerja yang jelas (divisi operasional, promosi digital, pemanduan & keselamatan, serta kebersihan & lingkungan). Kelembagaan ini perlu disinergikan dengan mendirikan unit usaha pariwisata di bawah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang disahkan melalui Peraturan Desa (Perdes). Langkah ini diiringi dengan penyelenggaraan program pelatihan berkala bagi anggota Pokdarwis dan warga lokal, mencakup pelatihan tata kelola destinasi, pemanduan wisata (*tour guiding*), standar keselamatan dan pertolongan pertama (*first aid*), serta manajemen keuangan transparan.
- c. Strategi Digitalisasi Promosi dan Pemasaran Niaga: Pokdarwis harus merancang dan mengelola saluran komunikasi digital resmi (melalui platform Instagram, TikTok, dan situs web informasi desa) yang mempublikasikan konten visual menarik mengenai keindahan Tiu Teja, Tiu Sekeper, serta puluhan air terjun lainnya secara konsisten. Narasi pemasaran harus menekankan pada keunikan "*Kingdom of Waterfall*", kesegaran alam dataran tinggi 650 mdpl, serta keaslian ekosistem yang terjaga. Kemitraan strategis juga perlu dibangun bersama agen perjalanan pariwisata, komunitas pecinta

alam, dan institusi perguruan tinggi untuk memperluas promosi paket wisata edukasi dan alam.

- d. Strategi Konservasi Lingkungan dan Perancangan Regulasi Berkelanjutan: Untuk mengantisipasi dampak kerusakan lingkungan akibat lonjakan pengunjung di masa depan, perlu diterbitkan regulasi lokal (*awig-awig* atau Peraturan Desa) yang menetapkan tata tertib pembuangan sampah, batasan jalur kunjungan, serta zonasi kawasan lindung di sekitar air terjun. Pembatasan daya dukung lingkungan (*carrying capacity*) harus diterapkan secara bertahap, terutama untuk destinasi berisiko tinggi seperti Tiu Sekeper. Penyiapan prasarana pengolahan sampah mandiri serta kampanye "*Leave No Trace*" wajib diintegrasikan dalam setiap paket kunjungan guna menjamin kelestarian ekosistem hutan tropis Desa Santong dalam jangka panjang.

SIMPULAN

Desa Santong di Kabupaten Lombok Utara memiliki potensi sumber daya ekowisata yang sangat besar dengan ketersediaan lebih dari 30 titik air terjun di kawasan dataran tinggi 650 mdpl, di mana Air Terjun Tiu Teja (40 meter) dan Air Terjun Tiu Sekeper (102 meter) menjadi daya tarik ikonik utama. Keaslian alam yang masih terjaga dan kesegaran udara pegunungan terbukti menghasilkan tingkat kepuasan yang tinggi (83%) di kalangan pengunjung. Kendati demikian, pengembangan kawasan ini masih dihadapkan pada hambatan mendasar berupa keterbatasan aksesibilitas fisik (jalan tanah/berbatu sepanjang 2 km yang licin saat hujan), keterbatasan sarana amenities dasar (ketiadaan toilet umum permanen, gubuk kayu darurat, dan minimnya rambu penunjuk arah), serta kelembagaan Pokdarwis yang belum memiliki struktur kerja fungsional, pelatihan profesional, maupun payung hukum BUMDes yang sah. Keterlibatan ekonomi warga lokal juga masih berada pada skala mikro dan terbatas pada kawasan di dekat lokasi wisata.

Implikasi praktis dari penelitian ini menuntut Pemerintah Desa Santong, Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara, dan pihak pengelola untuk segera mengambil langkah kolaboratif dalam memperbaiki jalur aksesibilitas darat ramah lingkungan, menyediakan fasilitas sanitasi dan petunjuk arah yang memadai, menyusun Peraturan Desa tentang tata kelola pariwisata dan konservasi, serta mendirikan unit usaha BUMDes pariwisata yang membawahi Pokdarwis. Implikasi teoritis penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan destinasi ekowisata berbasis masyarakat (*Community-Based Tourism*) pada kawasan dataran tinggi yang belum terjamah sangat bergantung pada keseimbangan antara penyediaan fasilitas fisik dasar (aksesibilitas dan amenities) dengan penguatan kapasitas kelembagaan swadaya lokal. Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokus kajian kualitatif berbasis lokasi spesifik serta penggunaan data rekapitulasi sampel kunjungan temporal, sehingga penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji secara kuantitatif kalkulasi daya dukung lingkungan (*carrying capacity*)

kawasan serta mengukur besarnya dampak ekonomi langsung (*economic multiplier effect*) keberadaan pariwisata terhadap tingkat pendapatan rumah tangga warga Desa Santong.

DAFTAR PUSTAKA

- Butler, R. W. (1980). The Concept of a Tourist Area Cycle of Evolution: Implications for Management of Resources. *The Canadian Geographer*, 24(1), 5–12.
- Cooper, C., Fletcher, J., Gilbert, D., & Wanhill, S. (2008). *Tourism: Principles and Practice (4th ed.)*. Pearson Education.
- Fandeli, C. (2002). *Perencanaan Kepariwisata Alam*. Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook (2nd ed)*. Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Remaja Rosdakarya.
- Rangkuti, F. (2015). *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Damanik, J., & Weber, H. F. (2006). *Perencanaan Ekowisata: Dari Teori ke Aplikasi*. Yogyakarta: CV Andi Offset. (Sangat relevan untuk memperkuat sub-bab Konsep dan Prinsip Ekowisata Berkelanjutan).
- Suansri, P. (2003). *Community Based Tourism Handbook*. Bangkok: Responsible Ecological Social Tour (REST). (Sangat relevan untuk memperkuat sub-bab Pengembangan Destinasi Wisata Berbasis Masyarakat / CBT).
- Sunaryo, B. (2013). *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media. (Sangat relevan untuk memperkuat aspek kebijakan dan tata kelola kelembagaan destinasi daerah).